Judul : Kaji Urgensi Pembangunan Gedung Baru
Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Kaji Urgensi Pembangunan Gedung Baru

WACANA pembangunan gedung baru DPR menuai tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafii Maarif. Menurut Buya, pembangunan gedung baru itu perlu pertimbangan dari insinyur arsitektur untuk melihat kelayakan gedung yang sudah ada saat. Hal itu penting untuk mengetahui kebutuhan yang sesungguhnya dalam konteks penataan kompleks parlemen.

Ia meminta Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati dalam menghadapi DPR terkait usulan pembangunan gedung baru tersebut. Ia khawatir jika keinginan dewan itu tidak dituruti akan berimbas pada upaya para politikus Senayan untuk menghambat sejumlah program pemerintah dengan cara tidak menyetujui anggaran.

"Buat saya, tak aneh jika DPR meminta fasilitas seperti gedung baru itu karena anggota DPR umumnya masih di bawah standar dan sangat tidak mewakili rakyat," tegasnya, kemarin.

Sementara itu, pengamat politik dari VoxPol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan anggota DPR seharusnya malu meminta pembangunan gedung baru di tengah minimnya prestasi dan kinerja mereka. "Anggota DPR yang memaksakan kehendak dan *ngotot* ingin membangun gedung baru seharusnya malu. Permintaan itu menunjukkan matinya hati nurani wakil rakyat," ujar Pangi di Jakarta, kemarin.

Jika dibandingkan, kata dia, usia Istana Negara bahkan jauh lebih tua daripada gedung parlemen, khususnya Gedung Nusantara I yang ingin diganti dengan gedung yang baru. Namun, Presiden tidak pernah mewacanakan atau meminta gedung atau istana baru. "Namun, DPR hampir setiap tahun merengek meminta gedung baru dengan berbagai alasan."

Berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GCB) pada Juli 2015 sampai Januari 2017, legislatif tercatat sebagai lembaga paling bersinggungan dengan praktik korupsi. Hal itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif di daerah (DPRD) dan pusat (DPR). Kedua, kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi utamanya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan ataupun kinerja pemberantasan korupsi di internal tidak maksimal. Ia mencontohkan dugaan korupsi pengadaan KTP-E yang menyeret sejumlah pimpinan dan anggota DPR.

Bila dicermati, imbuh Pangi, dari tiga fungsi yang ada, DPR dinilai lebih aktif menjalankan fungsi anggaran, khususnya kenaikan anggaran untuk institusi DPR sendiri. "Kita berharap DPR lebih berkonsentrasi pada fungsi legislasi agar undang-undang yang yang dihasilkan lebih berkualitas dan menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di masyarakat." (Nov/Mtvn/Ant/P-3)